



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFI HENDRI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG RISET KERJASAMA SISTEM INFORMASI DAN USAHA
3. NHK : 772570

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 992.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 896.300.000
2. Tanah Seluas 211 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 96.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 418.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000
2. MOBIL, BMW X1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 239.500.000
3. MOTOR, VESPA 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 445.076.864

F. HARTA LAINNYA Rp. 6.560.000

Sub Total Rp. 1.868.436.864

III. HUTANG Rp. 11.300.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.857.136.864

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.